

# PENGARUH PAD, DAU, DAK, DBH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

*THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, REVENUE SHARING FUND, SPECIFIC ALLOCATION FUND, AND REGIONAL EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH IN DISTRICT REGIONS OF UNDEVELOPED REGIONS*

*Rendy Alvaro<sup>8</sup>*

## **Abstract**

*This study aims to examine and analyze the effect of local revenue, general allocation fund, revenue sharing fund, specific allocation fund, expenditures for goods and services, capital expenditures, regional funds for education affairs on economic growth in district regions of undeveloped regions in indonesia. Research data uses secondary data obtained from the Ministry of Finance DJPK and BPS. The method uses panel data regression analysis using data from 2015-2019 in 122 Disadvantaged Regions in Indonesia. The results of this study indicate that the variables local revenue, general allocation fund, specific allocation fund, expenditures for goods and services, and education affairs funds and per capita income have a positive and significant effect. Meanwhile, the capital expenditure variable has a negative and significant effect, and Revenue Sharing Fund has no effect. The regression results show an adjusted R<sup>2</sup> value of 0.9969, which means that the variables of economic growth can be explained by variations of the independent variables, namely local revenue, general allocation fund, revenue sharing fund, specific allocation fund, expenditures for goods and services, capital expenditures, regional funds for education amounting to 99,69 percent. While the remaining 0.31 percent is explained by other variables outside the model.*

**Keywords:** Local Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Specific Allocation Fund, Expenditures for Goods and Services, Capital Expenditures, Regional Funds for Education, Economic Growth

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu

---

<sup>8</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; rendy.alvaro@yahoo.com

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Siuw, 2017).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 yang diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesudah mengalami berbagai revisi hingga menjadi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terakhir telah diubah melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Davoody dan Zou (1998) menemukan dampak desentralisasi fiskal yang berbeda antara negara sedang berkembang dan negara maju. Pada negara maju desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada negara berkembang desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Ganaie et al. (2018) menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam kasus India dan hasil yang terungkap bahwa desentralisasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik negara. Di sisi lain, desentralisasi penerimaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk dalam negeri. Desentralisasi Indonesia merupakan salah satu kisah sukses pembangunan global. Desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bisa dijadikan sebagai salah satu *best practice* di dunia namun juga memiliki keterbatasan dan permasalahan yang ada. Selain itu wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak dengan karakteristik yang berbeda-beda dapat menjadi perbedaan dengan negara lain.

Salah satu implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yaitu dengan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana. Indonesia yang terdiri dari 38 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten dan kota dan masih adanya permasalahan terdapat kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Permasalahan di tiap daerah sendiri sangat beragam. Mulai dari perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana dan sarana (infrastruktur), aksesibilitas, karakteristik daerah dan sampai pada rendahnya kemampuan keuangan lokal. Pemerintah daerah memiliki kendala di dalam memperoleh dana yang bersumber dari daerah itu sendiri, sehingga pembangunan daerah cenderung bergantung dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak baik dalam kelanjutan untuk pendistribusian pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai sendiri pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Disinilah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dikenal adanya transfer dari pemerintah pusat ke daerah melalui pemberian dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sumber-sumber penerimaan daerah di dalam melaksanakan desentralisasi berasal dari pembiayaan daerah dan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Masih minimnya peningkatan PAD di setiap daerah kabupaten

daerah tertinggal bila dibandingkan dengan jumlah dana perimbangan, menunjukkan lebih banyak bentuk sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dalam menunjang pembiayaan pembangunan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi/PDRB riil.

Menurut Kementerian Keuangan (2019) belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada APBD 2019 tercatat masih dominan dengan proporsi masing-masing sebesar 34,85 persen dan 24,28 persen dari keseluruhan APBD. Sedangkan belanja modal tercatat hanya sebesar 19,19 persen dari keseluruhan APBD. Porsi belanja modal yang relatif kecil ini mengakibatkan program pembangunan di pemerintah daerah relatif kurang diprioritaskan. Pembangunan infrastruktur melalui penyediaan pelayanan minimum seharusnya diprioritaskan untuk mengejar ketertinggalan antar daerah.

Pendidikan adalah salah satu pendorong pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan perekonomian, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan semakin tinggi produktivitasnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan kebijakan prioritas untuk pembangunan manusia dengan mengalokasikan anggaran APBD yang lebih besar untuk urusan pendidikan. Penentuan besaran anggaran untuk program dan kegiatan pendidikan sekarang sudah menjadi kewenangan pemda sepenuhnya dan tergantung sepenuhnya dari visi dan misi kepala daerah. Oleh karenanya maka besaran anggaran yang dialokasikan pemda dalam APBD untuk program dan kegiatan urusan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya akan bervariasi.

Pemerintah pada awalnya sejak tahun 2005 telah menetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Pada tahun 2015-2019, pemerintah telah menetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Jika kita melihat data persebaran daerah tertinggal di Indonesia menurut wilayah, terlihat bahwa daerah tertinggal lebih banyak tersebar di kawasan Indonesia bagian Timur. Daerah tertinggal masih memiliki indikator yang masih jauh dari rata-rata nasional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam rata-rata nasional sebesar Rp4.652.442 juta, sedangkan di daerah tertinggal baru mencapai Rp1.769.117 juta (Renstra Kemendesa 2015-2019). Indikator lainnya seperti pendapatan per kapita masih jauh dari rata-rata nasional dimana daerah tertinggal hanya mencapai Rp5.550 ribu dari Rp10.671 ribu untuk rata-rata nasional.

Adanya kesenjangan di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan. Namun sepertinya beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal masih merasa senang ditetapkan sebagai daerah tertinggal, agar uang pusat tetap dapat mengalir ke daerah (Ombudsman, 2020). Daerah yang ditetapkan daerah tertinggal bisa mendapat prioritas dana transfer dari pusat berupa DAK Afirmasi maupun Dana Desa. Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang adakalanya satu sama lain saling memengaruhi (Hasan, 2015)

Penulis akan melakukan penelitian terkait pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah yang terdiri dari Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Dana Daerah Urusan Pendidikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Daerah tertinggal di Indonesia. Dengan mengetahui bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal dan dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal, diharapkan dapat diambil kebijakan dalam rangka mendorong pemerintah untuk dapat memajukan daerah tertinggal yang dapat berorientasi pada faktor-faktor tersebut, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam Arini (2016), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan tersebut tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut. Lebih lanjut, setiap negara maupun daerah selalu mempunyai keinginan agar pertumbuhan ekonominya meningkat setiap tahunnya, dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga akan terangkat. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan nilai PDRB atas harga berlaku suatu daerah. PDRB atas harga berlaku merupakan jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Todaro (2000), tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi adalah untuk menghilangkan atau mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengangguran, kemiskinan di samping mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Adanya kesempatan kerja bagi masyarakat dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Pada suatu daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang kemudian dapat berdampak pada proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan dari masyarakat daerah itu sendiri. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah tersebut termasuk juga dalam hal pembangunan. Apabila terjadi kenaikan nilai pendapatan suatu daerah maka dapat menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi (Rahmah dan Zein, 2016). Hal ini bermakna pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonominya.

Menurut Deswantoro et al. (2017), salah satu peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah peran alokatif, yaitu pemerintah diwajibkan menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam peran alokatif ini semestinya dilakukan efektif dan efisien dengan merancang belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dalam APBD secara tepat dan proporsional. Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat pun diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## **2. Daerah Tertinggal**

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang dapat dikategorikan relatif tertinggal. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab yaitu letak geografis yang sulit dijangkau, tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial, ketidaktepatan kebijakan pembangunan. Sedangkan sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan; daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau; daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan antar negara baik batas darat maupun laut; daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir; daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 terdapat 122 daerah kabupaten daerah tertinggal.

## **3. PDRB**

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Perkembangan PDRB dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Proses kenaikan *output* per kapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

Menurut Todaro (2000), PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah. Samuelson dan William (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/*output* dari suatu negara.

Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumber daya manusia maksudnya kualitas *input* tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut

tersedianya manajemen, keterampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik. Kedua, sumber daya alam dengan faktor produksi adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

Ketiga, pembentukan modal. Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi. Keempat adalah perubahan teknologi dan inovasi. Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswasta yang bersedia menanggung risiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson dan William, 1995).

#### **4. Dana Perimbangan**

##### **a. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan pengertian DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU dialokasikan Pemerintah pusat berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu untuk suatu daerah yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

##### **b. Dana Bagi Hasil (DBH)**

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum.

DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagikan, termasuk sebagai pengoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

## 5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal setiap daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan PAD, karena dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan mampu membangun secara mandiri, yang selanjutnya berdampak pada kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya, maka akan memberikan kontribusi bagi produk domestik regional bruto (Mahafir dan Soelistiyo, 2017).

Bratakusuma & Solihin (2002) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya

## 6. Dana Daerah Urusan Pendidikan

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adanya jaminan hak atas "pendidikan dasar" bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun.

Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui peningkatan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajar 9 tahun. Dalam undang-undang ini juga dipertegas terkait dengan pendanaan bidang pendidikan yang tercantum pada Pasal 49 Ayat 1, yaitu “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.”

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pendidikan menjadi urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Dalam usaha untuk mewujudkan sinergi kebijakan pendidikan pusat dan daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat profil data pendidikan berupa Neraca Pendidikan Daerah. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) adalah *platform* informasi potret kinerja pendidikan pada suatu daerah, yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. NPD dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, sebagai basis data dalam penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dana daerah urusan pendidikan adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan di dinas pendidikan di luar transfer daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya pribadi peserta didik.

## 7. Kajian Empiris

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu diperlukan oleh penulis dalam rangka membandingkan serta memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Gonschorek dan Schulze (2018) menyatakan bahwa sistem transfer fiskal antar Pemerintah di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi telah bergerak ke arah yang benar secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Siliverstovs dan Thiessen (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di 22 provinsi wilayah Perancis dipengaruhi secara positif oleh sistem pemerataan fiskal. Raza dan Hafsa (2016) melakukan studi desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi provinsi dan efek *spoiler* di Pakistan. Hasil pengujian menyatakan bahwa desentralisasi pendapatan positif, sementara desentralisasi pengeluaran memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pakistan.

Thanh dan Canh (2019) melakukan studi desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi provinsi di Vietnam. Hasil studi mendapatkan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan positif

dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Vietnam dan pengaruh tata kelola publik terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda-beda antar provinsi tergantung pada berbagai tingkat tata kelola publik daerah. Temuan menyiratkan bahwa desain desentralisasi fiskal perlu dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan publik pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Oktafia et al. (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Rahmah dan Zein (2016) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hutabarat (2013) melakukan studi mengenai Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Mahafir dan Soelistiyo (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pengujian menyatakan PAD berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Rahman dan Chamelia (2015) melakukan penelitian faktor-faktor yang memengaruhi PDRB Kabupaten /Kota Jawa Tengah tahun 2008–2012. Dalam pengujian ditemukan bahwa secara parsial variabel tabungan dan kredit berpengaruh signifikan, sedangkan variabel PAD, dan belanja daerah tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2012.

Hasan (2015) melakukan analisis Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Hasil pengujian menemukan DAU, DBH dan suku bunga berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi DAK berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sulawesi Selatan. Dana transfer pemerintah pusat (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan DBH serta DAK dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Nisa (2017) telah melakukan Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

Dewi dan Suputra (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil studi tersebut menemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; DAU dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Anwar dkk. (2018) telah melakukan analisis Pengaruh PAD, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan, Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Putra (2018) melakukan penelitian dampak pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan selama periode dari 2007-2014.

Deswantoro dkk (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2015. Hasil Pengujian menemukan belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja barang dan jasa dan belanja hibah berpengaruh negatif dan signifikan. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Alfi dan Nuraini (2018) menunjukkan variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB.

Pusporini (2020) melakukan penelitian Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Soeharjoto et al. (2020) melakukan penelitian *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *exploratory research*. Objek telaahan penelitian eksplanasi (*exploratory research*) adalah untuk menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel; untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya; atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya. Format eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain.

Cakupan penelitian ini adalah 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Sedangkan series data yang digunakan yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2021), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2021) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021). Data diambil berdasarkan klasifikasi periode pada penelitian ini, yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2019.

#### **2. Metode Analisis**

Untuk alat analisis dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel dependen pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya adalah PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Dana Daerah Urusan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Data panel merupakan data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data *cross section* serta data *time series*. Berikut rumus regresi data panel jika ditulis dalam fungsi matematis.

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + \beta_4 \ln DBH_{it} + \beta_5 \ln BrgJas_{it} + \beta_6 \ln B.Mod_{it} + \beta_7 \ln DDUP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto per kapita

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \text{dst}$  : Koefisien Regresi Parsial

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

B.BrgJas : Belanja Barang dan Jasa

B.Mod	: Belanja Modal
DDUP	: Dana Daerah Urusan Pendidikan
e	: <i>error term</i>
t	: tahun
i	: kabupaten

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, pemilihan model dilakukan dengan uji Chow dan Uji Hausman seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Pengujian Chow Test**

Model	Prob. Cross-Section Chi-Squared	Keputusan	Keterangan
<b>Model 1</b>	0,0000	H <sub>0</sub> ditolak	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah

Hasil pengujian pada tabel 1, menunjukkan nilai probabilitas *cross-section chi-squared* pada model 1 sebesar  $0,0000 < 0,05$ , H<sub>0</sub> ditolak. dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya adalah dilakukan Hausman Test.

**Tabel 2. Pengujian Hausman Test**

Model	Prob. Cross-Section Random	Keputusan	Keterangan
<b>Model 1</b>	0,0000	H <sub>0</sub> ditolak	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 2, hasil pengujian menunjukkan nilai *probabilitas cross-section random* pada model 1 sebesar  $0,0000 < 0,05$ , H<sub>0</sub> ditolak. dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

**Tabel 3. Pengujian Koefisien Determinasi**

Model	R-Squared	Adjusted R-Squared
<b>Model 1</b>	0,997612	0,996977

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, menunjukkan nilai *adjusted r-squared* pada model 1 sebesar 0,9969 atau 99,69 persen, bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 99,69 persen, sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Tabel 4. Pengujian F-Statistic**

Model	F-Statistic	Prob. F-Statistic
<b>Model 1</b>	1570,184	0,00000

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, nilai dari probabilitas F-statistic pada model 1 sebesar  $0,0000 < 0,05$ , H<sub>a</sub> diterima. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 5. Hasil Estimasi Model 1 Fixed Effect Model**

<b>Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi</b>				
<b>Variabel Independen</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Prob.</b>	<b>Hipotesa</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>C</b>	-0,026970	0,0009		
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	0,000263	0,0000	$H_a$ Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Alokasi Umum</b>	0,008041	0,0000	$H_a$ Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	0,000490	0,0000	$H_a$ Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Bagi Hasil</b>	-4,25E-06	0,9246	$H_a$ Ditolak	Tidak Berpengaruh
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,000259	0,0075	$H_a$ Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Belanja Modal</b>	-0,000984	0,0000	$H_a$ Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Daerah Urusan Pendidikan</b>	8,92E-05	0,0001	$H_a$ Diterima	Pengaruh Signifikan

Sumber: Data Diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PAD sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari Pendapatan Asli Daerah adalah positif, disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktafia et al. (2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi. Apabila PAD yang diterima daerah semakin meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari DAU adalah positif, disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasan (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga daerah dapat membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan daerahnya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAK sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari DAK adalah positif, disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktafia et al. (2018) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya juga kepada daerah tertinggal. Dapat dijelaskan bahwa semakin besar DAK yang didapat kabupaten daerah tertinggal maka semakin baik pula pembangunan yang dilakukan daerah itu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas DBH sebesar  $0,9246/2 > 0,05$ ,  $H_a$  ditolak. Maka DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmah dan Zein (2016) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Hasugian (2020) yang menyatakan DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

DBH merupakan dana yang bersifat *by origin*. Dimana daerah penghasil akan mendapat porsi yang lebih besar daripada daerah lain. Dalam penelitian ini merupakan daerah tertinggal/daerah kurang maju. Sehingga porsi DBH yang diterima sangat kecil. Kemudian berdasarkan UU No. 33/2004, menyatakan bahwa DBH bersifat *block grant*. Akan tetapi, penggunaan DBH pada setiap daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai program yang berkaitan dengan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dengan demikian, daerah yang bukan merupakan penghasil utama tembakau, akan kesulitan meningkatkan potensi daerahnya dalam mendorong perekonomian daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari belanja barang dan jasa sebesar  $0,0075/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari belanja barang dan jasa adalah positif, disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hutabarat (2013) menyatakan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah, belanja barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah kabupaten setempat akan membuat produsen barang dan jasa untuk memberikan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan adanya produksi barang dan jasa tersebut akan berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah itu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari belanja modal sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari Belanja Modal adalah negatif, disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deswantoro dkk. (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal merupakan belanja jangka panjang, yang kemungkinan berdampak terhadap perekonomian cenderung lambat dan dalam jangka pendek akan membebani perekonomian. Akan tetapi, apabila dalam jangka panjang maka dampak belanja modal akan memengaruhi perekonomian secara positif.

Belanja modal melalui pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah. Belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah namun tidak bertujuan mencari profit. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan akan dapat menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang yang artinya efek dari adanya kegiatan belanja modal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun kemudian.

Faktor lainnya menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung untuk daerahnya. Belanja modal ini tergantung dari mutu yang diberikan apakah sesuai harapan, belanja modal mengarah ke kepentingan publik dan pelaksanaan belanja modal sesuai waktu yang ditentukan. Hal lain berdasarkan penelitian Nugroho dan Rohman (2012) berpendapat bahwa belanja modal berpengaruh negatif dikarenakan kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari dana daerah urusan pendidikan sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka dana daerah urusan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari dana daerah urusan pendidikan adalah positif, disimpulkan bahwa dana daerah urusan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan. Kualitas sumber daya manusia yang semakin baik melalui akses pendidikan maka akan memberikan tenaga kerja yang produktif dan semakin berkualitas maka akan berdampak pada produktivitas di kabupaten itu meningkat, yang kemudian dapat memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 6. Analisis Kemiringan per Kabupaten**

Cross-Section	Coef (Ci)	C	Intercept	Cross-Section	Coef (Ci)	C	Intercept
Kab. Teluk Bintuni	0.361581		-0.00975184	Kab. Landak	0.004078		0.000212227
Kab. Sumbawa Barat	-0.015263		-0.003036633	Kab. Lampung Barat	-0.014211		0.000216299
Kab. Sorong	-0.015451		-0.001952979	Kab. Paniai	-0.009341		0.000216677
Kab. Nunukan	-0.010368		-0.001389063	Kab. Buru Selatan	-0.000668		0.00021754
Kab. Mahakam Ulu	0.002258		-0.00109091	Kab. Aceh Singkil	-0.005244		0.000221909
Kab. Morowali Utara	0.051504		-0.000845375	Kab. Halmahera Selatan	-0.000978		0.000224336
Kab. Waropen	-0.013358		-0.000578264	Kab. Jenepono	-0.00489		0.000234019
Kab. Raja Ampat	-0.019071		-0.000573814	Kab. Situbondo	0.021276		0.000238361
Kab. Nabire	0.112593		-0.000549864	Kab. Melawi	0.000576		0.000243728
Kab. Boven Digoel	-0.004363		-0.00054892	Kab. Mappi	-0.016385		0.000248771
Kab. Sarmi	-0.012097		-0.000457519	Kab. Seluma	-0.003069		0.000251927
Kab. Supiori	0.006088		-0.000396621	Kab. Pegunungan Bintang	-0.002379		0.000257267
Kab. Mamberamo Raya	-0.008838		-0.00039538	Kab. Mamberamo Tengah	-0.015168		0.000262931
Kab. Merauke	-0.016622		-0.000260422	Kab. Intan Jaya	-0.003674		0.000267596
Kab. Keerom	-0.003167		-0.000259775	Kab. Hulu Sungai Utara	-0.016451		0.000269673
Kab. Konawe Kepulauan	-0.000992		-0.000256215	Kab. Kepulauan Tanimbar	-0.006045		0.000271777
Kab. Teluk Wondama	-0.011748		-0.000227897	Kab. Sumba Tengah	0.009632		0.00027593
Kab. Musi Rawas Utara	-0.005988		-0.000200414	Kab. Maybrat	-0.01548		0.000276254
Kab. Kepulauan Mentawai	0.009656		-0.000180214	Kab. Halmahera Barat	-0.013682		0.000277845
Kab. Musi Rawas	-0.006639		-0.000164193	Kab. Bangkalan	-0.010886		0.000279625
Kab. Seruyan	-0.006884		-0.000129807	Kab. Sumba Timur	-0.009224		0.00028483
Kab. Kepulauan Yapen	0.072413		-0.000109984	Kab. Maluku Barat Daya	-0.012774		0.00028804
Kab. Sorong Selatan	0.000895		-0.000109094	Kab. Sumba Barat	0.016964		0.000289307
Kab. Pohuwato	-0.011901		-8.92437E-05	Kab. Belu	0.040449		0.000290089
Kab. Ketapang	0.020388		-6.08983E-05	Kab. Rote Ndao	-0.008228		0.000293595
Kab. Bombana	0.031345		-4.28284E-05	Kab. Deiyai	0.001466		0.0002964
Kab. Banggai Laut	-0.007869		-3.9538E-05	Kab. Ende	-0.010077		0.000300014
Kab. Buol	-0.008677		-2.64036E-05	Kab. Nias Selatan	-0.007388		0.000303089
Kab. Donggala	-0.005199		-2.41382E-05	Kab. Lombok Barat	-0.01239		0.000316844
Kab. Halmahera Timur	-0.002379		-1.55347E-05	Kab. Bima	-0.018541		0.00032097
Kab. Tojo Una Una	-0.000501		8.9001E-06	Kab. Sabu Raijua	-0.012737		0.000323155
Kab. Sigi	0.004813		1.3512E-05	Kab. Bondowoso	-0.010302		0.000326256
Kab. Solok Selatan	-0.014046		1.56156E-05	Kab. Buru	0.021441		0.000334158
Kab. Banggai Kepulauan	-0.002265		1.8016E-05	Kab. Asmat	-0.010727		0.000343517
Kab. Kayong Utara	-0.003119		2.63767E-05	Kab. Nagekeo	-0.009539		0.000343544
Kab. Pasaman Barat	0.007431		2.67542E-05	Kab. Malaka	-0.012738		0.000344515
Kab. Biak Numfor	-0.005549		4.19653E-05	Kab. Tambräu	0.004045		0.000344919
Kab. Toli-Toli	-0.00802		6.10871E-05	Kab. Yalimo	-0.005372		0.000347293
Kab. Pesisir Barat	-0.014025		6.35413E-05	Kab. Sampang	-0.014695		0.000360265
Kab. Konawe	-0.017135		6.41616E-05	Kab. Seram Bagian Barat	-0.018528		0.000369004
Kab. Kepulauan Aru	-0.005462		6.41616E-05	Kab. Kupang	-0.018419		0.000378254
Kab. Boalemo	0.001588		7.13357E-05	Kab. Maluku Tengah	-0.01068		0.000378821
Kab. Pulau Taliabu	-0.008318		7.52733E-05	Kab. Dogiyai	-0.00673		0.000380007
Kab. Gorontalo Utara	0.003309		8.27709E-05	Kab. Timor Tengah Utara	0.0095		0.000383271
Kab. Bengkayang	-0.011238		8.41194E-05	Kab. Lembata	-0.018178		0.000396324
Kab. Parigi Moutong	0.000979		8.5414E-05	Kab. Manggarai Barat	0.00845		0.000409081
Kab. Mamuju Tengah	-0.011124		9.90878E-05	Kab. Lebak	0.01466		0.000411643
Kab. Sambas	-0.010561		0.00011767	Kab. Pandeglang	-0.002791		0.000416713
Kab. Nias Utara	-0.000579		0.000131883	Kab. Alor	-0.01409		0.000417496
Kab. Kapuas Hulu	-0.00033		0.000140217	Kab. Manggarai	-0.008066		0.000427798
Kab. Nias	-0.001556		0.000141431	Kab. Sumba Barat Daya	-0.01099		0.000441903
Kab. Nias Barat	-0.006374		0.000144883	Kab. Nduga	-0.019386		0.00044274
Kab. Jayawijaya	-0.002645		0.00014731	Kab. Manggarai Timur	-0.016416		0.000443683
Kab. Dompu	-0.009037		0.000149657	Kab. Lombok Tengah	-0.011982		0.000448295
Kab. Sumbawa	0.020353		0.000161496	Kab. Timor Tengah Selatan	-0.009922		0.000462131
Kab. Seram Bagian Timur	-0.009999		0.000163034	Kab. Puncak Jaya	0.014706		0.000490261
Kab. Lombok Utara	-0.002356		0.000171907	Kab. Tolikara	-0.012877		0.00049676
Kab. Sintang	-0.008034		0.000179054	Kab. Lanny Jaya	-0.009749		0.0004997
Kab. Pulau Morotai	0.006682		0.000181508	Kab. Yahukimo	-0.010231		0.000500051
Kab. Polewali Mandar	-0.015862		0.000185661	Kab. Lombok Timur	-0.010243		0.000514345
Kab. Kepulauan Sula	-0.010756		0.000199254	Kab. Puncak	-0.012789		0.00052284

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 6, menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki nilai intersep/kemiringan terendah. Dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan dana daerah urusan pendidikan tidak berpengaruh. Maka Kabupaten Teluk Bintuni memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang termasuk dalam kabupaten dalam objek penelitian.

Kabupaten Puncak memiliki nilai intersep tertinggi. Dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan dana daerah urusan pendidikan tidak berpengaruh. Maka Kabupaten Puncak memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang termasuk dalam kabupaten dalam objek penelitian.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7, di bawah terlihat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki koefisien ditambah konstanta terbesar dari 122 kabupaten daerah tertinggal. Sedangkan Kabupaten Puncak memiliki koefisien ditambah konstanta terbesar dari 122 kabupaten daerah tertinggal.

**Tabel 7. Koefisien Dan Konstanta Tertinggi Dan Terendah**

5 Daerah Tertinggi	Coef	C	Coef + C	5 Daerah Terendah	Coef	C	Coef + C
TELUKBINTUNI	0,361581	-0,02697	0,334611	TOLIKARA	-0,018419	-0,02697	-0,0454
SUMBAWABARAT	0,112593	-0,02697	0,085623	LANNYJAYA	-0,018528	-0,02697	-0,0455
SORONG	0,072413	-0,02697	0,045443	YAHUKIMO	-0,018541	-0,02697	-0,0455
NUNUKAN	0,051504	-0,02697	0,024534	LOMBOKTIMUR	-0,019071	-0,02697	-0,0460
MAHKAMULU	0,040449	-0,02697	0,013479	PUNCAK	-0,019386	-0,02697	-0,0464

Sumber: data diolah

## V. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal dan dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

PAD menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- Pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- Pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- d. Pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- e. Pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

Belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- f. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- g. Pengaruh dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

Dana daerah urusan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini. Bagi pemerintah daerah kabupaten daerah tertinggal sebaiknya lebih memaksimalkan potensi sumber daya alam atau sumber ekonomi yang dimiliki wilayahnya. Pemerintah kabupaten daerah tertinggal masih bergantung pada transfer pusat dan belum mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Maka sebaiknya pemerintah daerah kabupaten daerah tertinggal perlu meningkatkan potensi penerimaan daerahnya agar lebih mandiri dalam mendanai pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Diperlukan strategi daerah dalam memanfaatkan PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal dan dana daerah urusan pendidikan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayahnya kepada sektor-sektor yang produktif yang dalam jangka panjang akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal.

Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang data yang lebih panjang tidak dalam kurun waktu 5 tahun saja agar dapat menggambarkan pengaruh dari tiap variabelnya. Selain itu, dapat memilih variabel lain seperti pertumbuhan penduduk, kesehatan, pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M., Abdullah, F., Hadi, S. 2018. Analisis Pengaruh PAD, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Vol 2 jilid 1 Tahun 2018.

- Alfi, S.A.F, dan Nuraini, I. 2018. Analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap PDRB di kabupaten/kota provinsi Kalimantan selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Vol.2 Jilid 3 Tahun 2018.
- Arini, Prima A. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Vol.2 No.2 November 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Bratakusuma Deddy S., Solihin Dadang. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi kedua. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Davoody, H & Zou, Z. 1998. *Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study*. Journal of Urban Economics
- Deswantoro, D.B., Ismail, A., Hendarmin. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 6 No. 3 tahun 2017.
- Dewi, N.W.R. dan I Dewa G.D.S. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntasi Universitas Udayana
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2021). Realisasi APBD. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Ganaie, Aadil & Bhat, Sajad & Kamaiah, Bandi & Khan, N.. (2018). *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indian States*. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance. 7. 227797871876007. 10.1177/2277978718760071.
- Gonschorek, G.J., dan Schulze, G.G. 2018. *Continuity or Change? Indonesia's Intergovernmental Fiscal Transfer System under Jokowi*. Journal of Southeast Asian Economics Vol. 35, No., 2 (2018).
- Hasan, M. 2015. Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Jurnal Economix Vol 3 Nomor 1.
- Hutabarat, P. 2013. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021) Neraca Pendidikan Daerah. [www.npd.kemdikbud.go.id](http://www.npd.kemdikbud.go.id)
- Mahafir, A. Dan Soelistiyo, A. 2017. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Vol 1 No. 2 2017.

- Nainggolan, B.R.M, dan Hasugian S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2016-2018. Jurnal Akrab Juara.
- Nisa, Aulia A. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. Diponegoro Journal of Accounting.
- Oktafia, A.M., Aris S., dan Zainal A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi.
- Ombudsman. 2020. Ombudsman NTT: Jangan Bangga jadi Bupati Daerah Tertinggal. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ntt-jangan-bangga-jadi-bupati-daerah-tertinggal>
- Pusporini, D.I. 2020. Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2020.
- Putra, Widhu. 2018. Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan Vol.6 No.2, 120-138.
- Rahmah, AR, dan Basri Zein. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntasi (JIMEKA). Vol. 1, No.1, (2016).
- Rahman, Y.A, dan Chamelia, A.L. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten /Kota Jawa Tengah tahun 2008-2012. Journal of Economic and Policy Universitas Negeri Semarang.
- Raza, Q. dan Hina, H. 2016. *Fiscal Decentralisation, Provincial Economic Growth and Spillover Effects: A Spatial Panel Data Analysis. The Pakistan Development Review*. Journal article JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/44986014>
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus William D. 1995. Ekonomi (Edisi Terjemahan). Edisi 12. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.
- Siliverstovs, B dan Thiessen, U. 2015. *Incentive Effects Of Fiscal Federalism: Evidence for France*. Cogent Economics & Finance. Journal article Researchgate. [https://www.researchgate.net/publication/276839164\\_Incentive\\_effects\\_of\\_fiscal\\_federalism\\_Evidence\\_for\\_France](https://www.researchgate.net/publication/276839164_Incentive_effects_of_fiscal_federalism_Evidence_for_France).
- Soeharjoto, et al.. *Flypaper Effect On Regional Spending In Central Java Province*. Internasional Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 4, Issue 4, 2020.

Siwu. 2017. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 19 No. 3.

Thanh, S.D., dan Canh, N.P. 2019. *Fiscal Decentralization And Economic Growth Of Vietnamese Provinces: The Role Of Local Public Governance*. Annals of Public and Cooperative Economics 2019. Journal Article [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3586887](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586887).

Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga